## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamanda Bobi .(2018).Transparanssi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS di SMA N 5 Madiun Jawa Timur Tahun Ajaran 2017/2018.Skripsi.Universitas Muhamadyah Surakarta.Surakarta.
- Andrean, Beny. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 13 No. 1, halaman: 15-27.
- Arifin, Muhammad (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Skripsi Universitas Jember*. Jember.
- Arnstein SR. (1969). A Leadder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, Volume 35 (4).
- Arvian, Trianto (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi dana desa (add) di desa Tegeswetan Dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo. *Jurnal akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta. vol.4 No. 3, thn. 2012, hal.179 188
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan . 2003. Diskusi tentang Akuntabilitas, Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Bhakti. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau). *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri*, Vol.4, No. 3, Thn.2015, Hlm111-116.
- DeNardis L. A., (2010). From Equity to Adequacy: Evolving Legal Theories in School Finance Litigation: The Case of Connecticut. *Journal International*. M.E. Sharpe Inc. New York.
- Cable News Network Indonesi .(2016) *kasus korupsi dalam sektor pendidikan*. Jakarta : Trans Media dan Warner Media.
- Fatimah, N.P. (2018). Pengaruh kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi). Bandung: Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung. Bandung
- Febrianto, M.C., Sujana, Edy, dan Yuniarta G.A., (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Akuntabilitas Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Bangli. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 8 No: 2
- Ghartey, J.B. (1998), Decentralisation Transparency Social Capital and Development, Massachusetts.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Mulivariate dengan Program SPSS. Semarang UNDIP.

- Gorret, N. (2010). Influence of Parents' Participation in Secondary School Management on Students' Academic Performance in Buyaga County Kibaale District. *Kampala: Makerere University*. Kampala Uganda.
- Gyanto. (2013). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Skripsi. Universitas Muhamadyah Surakarta. Surakarta.
- Hamid. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis Universitas Tadaluko*. Sulawesi Tengah. vol.3, No.1, Thn. 2015, Hlm.121-137.
- Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. (Edisi 5). BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hendratmi,henny, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti. (2017) Pengaruh Transparansi dan Komitment Terhadap Akuntabililitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi, Universitas pancasila*. Jakarta.
- Indah Mudorasatu.(2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo). Skripsi thesis, Uuniversitas Muhamadyah Ponorogo. Ponorogo.
- ItaRakhmawati. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Dengan Partisipasi Pemangku Kepentingan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi. STAIN Kudus.* Kudus.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency costs and ownership structur. Jurnal Of Financial Economics.
- Jurniadi. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur*. Kalimantan Timur.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2006. Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Jakarta: Kemendiknas.
- Krina. (2003). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Vol 4, No.5.
- Krisnayanti, Idaayu dan Ari,Putu. 2014. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Goodwill Vol. 8 No. 2. 2017

- Ledvina V. Carino.(2002). Administrative Accoumtability, San Francisco State University Fall.
- Mardiasmo.(2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mada, Sarifudin., Kalangi, L., Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Goodwill Vol. 8 No. 2. 2017
- Mudarosatun, Niken I. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Muhammad, IBK. 2007. Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi Management Audit. Jakarta: Salemba Empat.
- Mujiono. (2017) Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Skripsi. Universitas Galuh Ciamis. Ciamis.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Jakarta : Kemdikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013. Jakarta: Kemdikbud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta. Pedoman pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawyah Negeri dan Swasta Dalam Kabupaten Muara Enim.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). The 2nd University Research Coloquium 2015. ISSN 2407-9189
- Riyanto, Teguh. (2015). Akuntabilitas Financial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." Jurnal Administrasi Negara Vol. 3, No. 1, Thn. 2015. Hlm. 119-130.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- sripoku.com.(2018).Dana BOS Digunakan Seoptimal Mungkin untuk Operasional Sekolah, Diakses: 24 desember 2018 (09.15 wib) dari http://palembang.tribunnews.com/2018/10/01/dana-bos-digunakan-seoptimal-mungkin-untuk-operasional-sekolah.

- Sugiarti, Ekasari., Yudianto, I. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya Dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyanto.(2012). Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset.Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: CAPS.
- Supranto J. (2010). Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: UI Press.
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 403/KPTS/DISDIKBUD Tahun 2018.
- Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Triuriana, Erwin A. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Jember.
- Turner, Mark., Hulme, D. 2015. *Governance, Management and Development: Making the State Work.* Macmillan. Basingstoke.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.Hal 21-23*
- Widyatama, Arif., Novita, L., Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 Tahun 2017, Hal. 1-20.
- Wulandari. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Jember.